



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI**

2019

L
K
I
P



BUKITTINGGI 2020

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriandan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi merupakan perwujudan tanggungjawab atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun 2019.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019 pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sangat tinggi, yang tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, focus dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari masih terdapat indicator kinerja yang belum tercapai.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan public dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. LKIP DPMPTSPPTK 2019 diharapkan dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bukittinggi, Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI**



ISRA YONZA, SH, MH

NIP. 19710719 200212 1 003

**IKHTISAR EKSEKUTIF
EXECUTIVE SUMMERY**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (LKIP DPMPTSPPTK) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP DPMPTSPPTK merupakan bagian dari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Penyusunan LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam target sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKIP juga memuat capaian realisasi keuangan dan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan public kepada masyarakat di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja pada Tahun 2019. Serta memuat mengenai analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kegiatan atau program, analisa efisiensi penggunaan sumber daya dan analisa program/kegiatan yang menunjang pencapaian Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 dapat dilihat dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut: (1). Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, target 86% dengan realisasi 79,75% (tingkat capaian 93%); (2). Meningkatnya peluang investasi dengan indikator kinerja Persentase peningkatan realisasi investasi, target 8% dengan realisasi 16% (tingkat capaian 200%); (3). Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan indikator ICOR (Incremental Capital

Output Ratio), target 3,8 realisasi 4,11 (91%) dan (4). Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, target 5,5% dengan realisasi 6,49% (88%). Secara keseluruhan capaian kinerja beberapa berada pada kategori Sangat Tinggi.

Pada Tahun 2019 DPMPTSPPTK juga melaksanakan penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.824.121.810,75,- (82,41%) dari target sebesar Rp.1.000.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp.6.995.812.161,- dengan realisasi sebesar Rp.6.798.290.755,- (97,18%) serta Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp.16.671.396.590,- dengan realisasi sebesar Rp.16.245.541.937,- (97,45%). Secara keseluruhan total Belanja yaitu Rp.23.667.208.751 dengan realisasi Rp.23.043.832.692,- (97,37%). DPMPTSPPTK memiliki 13 (tiga belas) program dan 55 kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran. Secara umum capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan berada pada kategori sangat tinggi bahkan mencapai 100%. Untuk realisasi fisik dan keuangan yang dibawah 100% pada umumnya merupakan bentuk efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program dan kegiatan.

LKIP DPMPTSPPTK ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu perindustrian dan tenaga kerja. Dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola, penataan system teknologi informasi yang terintegrasi, perbaikan perencanaan yang efektif dan efisien, pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat guna serta peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam berbagai pemecahan permasalahan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
EXECUTIVE SUMMERY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	li
DAFTAR ISI	lii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum SKPD	3
1.3. Isu Strategis	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis SKPD	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019	24
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2019	40
BAB IV PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	13
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriahn dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019	15
Tabel 2.4 Target Pendapatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriahn dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019	20
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	24
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2019	25
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2018 dan Tahun 2019	25
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra	27
Tabel 3.5 Efisiensi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019	29
Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan dan Belanja DPMPTSPPTK Tahun 2019	35
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019	36

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriandan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	7

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai salah satu instansi dibawah naungan Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang selanjutnya disebut LKIP DPMPTSPPTK.

Penyusunan LKIP DPMPTSPPTK ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Kota Bukittinggi khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi.

Proses penyusunan LKIP DPMPTSPPTK dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.

a. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019 dilaksanakan dengan dasar hukum:

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. Maksud dan Tujuan

LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Penyusunan LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sesuai target oleh Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2019. Selanjutnya diharapkan juga dapat mendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. LKIP DPMPTSPPTK juga berguna untuk evaluasi dalam upaya melakukan perbaikan yang bekersistinambungan dalam meningkatkan kinerja serta dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bagian dari pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat Kota Bukittinggi.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Kota Bukittinggi menetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi . Adapun ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan unsur Pelaksana tugas Walikota dibidang Pelayanan Perizinan / Non Perizinan di Daerah dengan sistem satu pintu .
- b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantu bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun

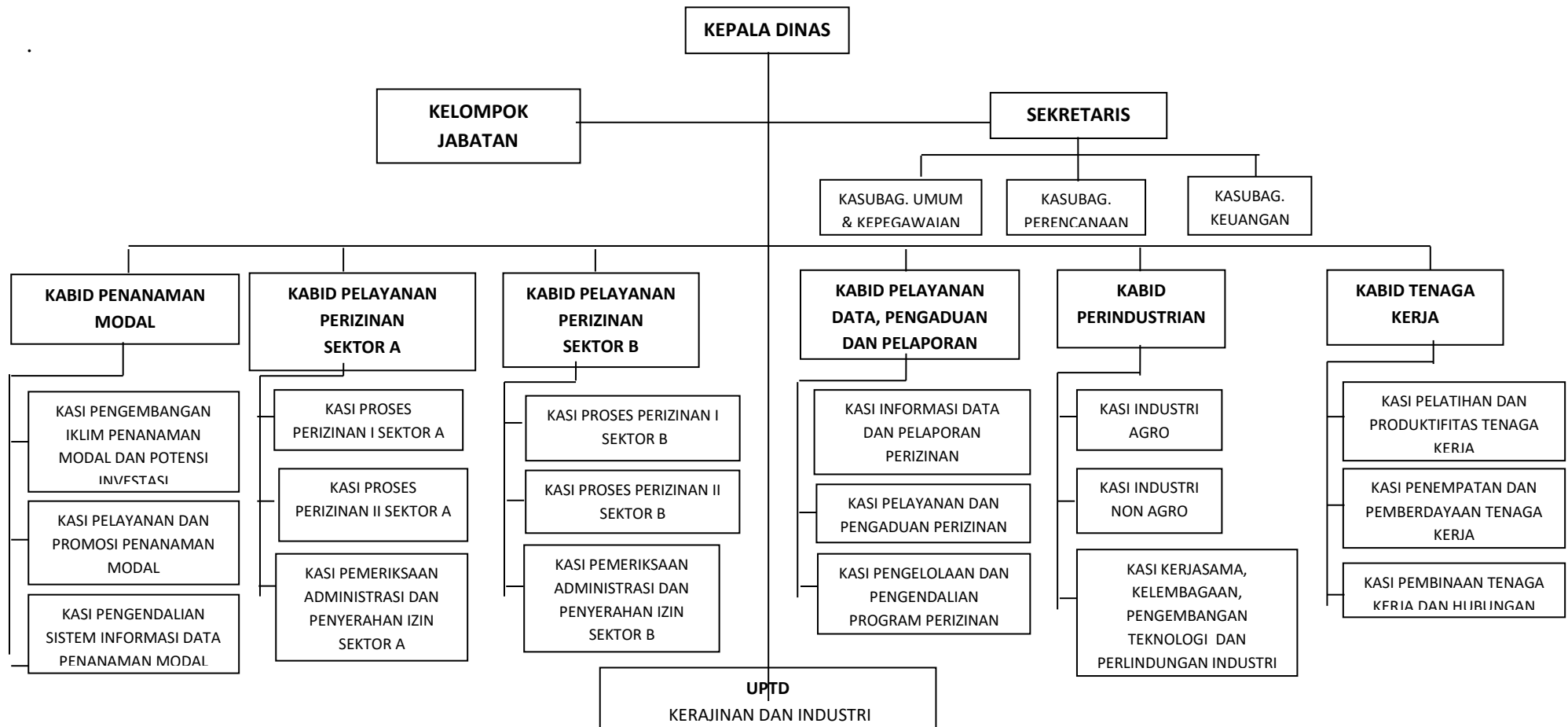
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Daerah Kota Bukittinggi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1. Kasubag Umum
 - 2. Kasubag Keuangan
 - 3. Kasubag Perencanaan
- c. Kabid Penanaman Modal
 - 1. Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi
 - 2. Kasi Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal
 - 3. Kasi Pengendalian Sistem Informasi Data Penanaman Modal
- d. Kabid Pelayanan Perizinan Sektor A
 - 1. Kasi Proses Perizinan I Sektor A
 - 2. Kasi Proses Perizinan II Sektor A
 - 3. Kasi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor A
- e. Kabid Pelayanan Perizinan Sektor B
 - 1. Kasi Proses Perizinan I Sektor B
 - 2. Kasi Proses Perizinan II Sektor B
 - 3. Kasi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B
- f. Kabid Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan
 - 1. Kasi Informasi Data dan Pelaporan Perizinan
 - 2. Kasi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan
 - 3. Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan
- g. Kabid Perindustrian
 - 1. Kasi Industri Agro
 - 2. Kasi Industri Non Agro
 - 3. Kasi Kerjasama, Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Industri

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

- h. Kabid Tenaga Kerja
 - 1. Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 2. Kasi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - 3. Kasi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
- i. Ka. UPTD Kerajinan Industri

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI



1.3. ISU STRATEGIS SKPD

Berdasarkan pada gambaran pelayanan DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi; visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dan implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSPPTK serta metode analisis SWOT pada BAB II, selanjutnya dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam peraturan dan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai instansi teknis yang menangani bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja sehingga dapat memainkan peran dalam menggerakkan sektor perekonomian.
2. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM (kompetensi teknis, konseptual maupun untuk berinteraksi secara aktif) dan kecukupan infrastruktur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sehingga dapat mengantisipasi perkembangan global dengan membangun sikap kompetitif, handal, berwawasan, kreatif dan inovatif. Karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan Kota Bukittinggi.
3. Perkembangan teknologi dan informasi dalam konsep tata pemerintahan dan pelayanan publik modern harus diikuti oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, yang pengembangannya terintegrasi dalam pelayanan perizinan, pengawasan, dan ketersediaan data perizinan yang up to date. Serta diharapkan dapat menjadikan teknologi dan informasi yang dikembangkan juga menjadi sarana dalam pelayanan pencari kerja, informasi pasar kerja, informasi produk industri kecil menengah dan informasi bentuk fasilitasi pelatihan ketenagakerjaan yang dikelola DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.
4. Kondisi potensi dan peluang investasi di Kota Bukittinggi sebagai sebuah kawasan destinasi pariwisata dan perdagangan diyakini akan memicu pertumbuhan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini juga mengharuskan

pemerintah sebagai perantara dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan pekerja/buruh sehingga kedua belah pihak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilandasi dengan azas kesamaan dalam hukum dan azas kesetaraan keadilan.

5. Perubahan struktur pasar dan selera masyarakat terhadap kualitas produk industri kecil menengah akan memberikan pengaruh terhadap daya saing produk IKM sehingga IKM harus meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam produk dan strategi bisnis. Fasilitasi dan pembinaan dari DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi juga memegang peranan yang penting dalam mendukung perkembangan Industri Kecil Menengah.
6. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan industri kecil menengah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
7. Rendahnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja. Perluasan lapangan kerja tetap merupakan masalah yang cukup mendesak dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Disamping kelebihan tenaga kerja, kondisi pasar kerja di Kota Bukittinggi ditandai dengan pasar kerja yang kurang berkualitas di mana pendidikan angkatan kerja relatif masih rendah.
8. Peran pemerintah daerah dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini hubungan industrial di Kota Bukittinggi masih memiliki kendala, diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti : Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit dll.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Bab. I PENDAHULUAN

Mengemukakan uraian singkat tentang organisasi, kedudukan dan tugas pokok dan fungsi organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, struktur organisasi secara garis besar dan bagaimana antar bagian bersinergi mencapai sasaran dan tujuan, gambaran tentang apa yang diharapkan masyarakat dan Stakeholder atas keberadaan organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Berisikan Visi, Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Organisasi, Sasaran, Program, Kegiatan yang ingin dicapai dan indikator serta target dan Rencana Kerja yang dituangkan dalam anggaran atau anggaran yang tersedia untuk mewujudkan kinerja yang diinginkan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja Sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.

Bab IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi dalam pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS SKPD

Perencanaan strategis Pemerintah Kota Bukittinggi telah tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah. Maka Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja menyusun dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah berupa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Bukittinggi pada RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 yaitu: **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**, maka dirumuskanlah kerangka pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun dalam Renstra DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2016-2021. Misi pada RPJMD yang menaungi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah :

1. Misi 2 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan
2. Misi 4 yaitu Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih berdaya Guna.

Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dalam pengembangan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah, yang memuat

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Visi dan misi diatas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya nilai investasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
2. Meningkatnya peluang investasi
3. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
4. Meningkatnya kesempatan kerja.

**Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Kinerja pada Th Ke					Kondisi Akhir Renstra 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
2	Menurunnya nilai investasi	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	5%	6%	7%	8%	9%	10%	10%
		Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5	3,5
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,88%	5,84%	5,70%	5,50%	5%	4,93%	4,93%

b. Strategi dan Kebijakan

Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu misi 2 “Meningkatkan kinerja pemerintahan secara lebih profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan” dan misi 4 “Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna”. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Visi : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya			
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan			
Misi 4 RPJMD : Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkat kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	1.Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanaman modal, perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu	1.Menyediakan bangunan gedung kantor yang lebih representatif 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal 3.Mengembangkan system informasi perizinan dan tenaga kerja secara online
		2.Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur penanaman modal dan perizinan	1. Mengikuti seminar, sosialisasi, bintek dan pelatihan penanaman modal 2. Melakukan koordinasi dan sharing informasi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Visi : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya			
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan			
Misi 4 RPJMD : Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			dalam peningkatan pelayanan
Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya realisasi investasi	1. Mendorong berkembangnya penanaman modal diberbagai sektor ekonomi	1. Melaksanakan promosi investasi dalam dan luar negeri 2. Meningkatkan kerjasama kelompok usaha besar dengan usaha kecil menengah 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan penanaman modal
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen industry kecil menengah dan produk yang berdaya saing	1. Meningkatkan kemampuan teknologi industri 2. Meningkatkan kapasitas Iptek sistem industri 3. Meningkatkan pelatihan IKM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industry yang kompetitif 4. Penataan terhadap struktur industri 5. Fasilitasi bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal dan standarisasi internasional dalam produksi
		3. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan industry kecil menengah serta kelompok usaha bersama dalam	1. Pengembangan terhadap sentra-sentra potensial

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Visi : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya			
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan			
Misi 4 RPJMD : Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		pengembangan sentra industry potensial	2. Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif 3. Mengikuti pengembangan sumberdaya aparatur bidang industry
	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	1. Menyediakan data dan informasi penanaman modal yang akurat	1. Menyediakan informasi dan kajian peluang investasi 2. Membuat rencana umum penanaman modal 3. Menyediakan data PMDN dan PMA
	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Menegakkan regulasi ketenagakerjaan dalam hubungan industrial yang sehat dan produktif	1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lembaga penegakkan hukum ketenagakerjaan 2. Peningkatan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama 3. Pembinaan pengurus dan anggota serikat pekerja 4. Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja/SP mengenai hubungan kerja 5. Pengintegrasian sistem informasi pasar kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan dan pencari kerja

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Visi : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya			
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan			
Misi 4 RPJMD : Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ketenagakerjaan. 7. Mengikuti pengembangan sumber daya aparatur bidang tenaga kerja
		2. Melakukan fasilitasi dan pembinaan ketenagakerjaan yang efektif dan efisien	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja 2. Pengembangan pola pendanaan pelatihan melalui koordinasi, pemerintahan, pemerintah daerah dan lembaga pelatihan swasta

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam periode satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala DPMPTSPPTK dengan Walikota

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Bukittinggi. Dalam penyusunannya perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan anggaran atau DPA. Berikut ini Perjanjian Kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	8%
3	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3,8
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,50%

Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam intern Dinas disusun Perjanjian Kinerja antara eselon III dengan eselon II dan eselon IV dengan eselon III berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing pejabat terkait (terlampir). Capaian target pada Perjanjian Kinerja di atas juga didukung dengan program dan kegiatan serta anggaran Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2019 mempunyai 13 (tiga belas) program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi
- k. Penyediaan jasa pegawai non PNS
- l. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan peralatan kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - c. Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik)
- 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
- 4. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - a. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- 5. Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah
 - a. Kajian penanaman modal
- 6. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - a. Mengikuti promosi investasi dalam dan luar negeri
- 7. Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat
 - a. Dokumentasi dan pelaporan perizinan
 - b. Pengelolaan aplikasi perizinan online
 - c. Publikasi media luar ruang pelayanan perizinan
 - d. Penelitian dan kajian hukum perizinan
 - e. Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat
 - f. Pelayanan perizinan sector A
 - g. Pelayanan perizinan I sektor B

- h. Pelayanan perizinan II sektor B
 - i. Tim koordinasi perizinan
 - j. Pengelolaan dan penyajian informasi data
 - k. Pengawasan tempat usaha
 - l. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
8. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- a. Pelatihan kewirausahaan
 - b. Pelayanan pembinaan dan pengembangan produktivitas lembaga latihan swasta
 - c. Pelatihan pembuatan bedcover
 - d. Monev eks siswa pelatihan
 - e. Pelatihan instruktur lembaga latihan swasta
 - f. Pelatihan montir sepeda motor
 - g. Pelatihan pembuatan dendeng singkong
 - h. Pelatihan modeste dasar untuk pemula.
9. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- a. Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial
 - b. Penerapan system deteksi dini kasus PHI di perusahaan
 - c. Asistensi dan pembinaan peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - d. Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan
 - e. Peningkatan kualitas SDM pegawai teknis ketenagakerjaan.
10. Program peningkatan kesempatan kerja
- a. Pelayanan dan penempatan tenaga kerja
11. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- a. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
 - b. Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri
 - c. Pelatihan rendo koto gadang
 - d. Perkuatan organisasi mitra UPTD Kerajinan Industri
12. Program pengembangan industri kecil dan menengah
- a. Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi
 - b. Pembinaan industri kecil menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
 - c. Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2019-2039.

13. Program pengembangan sentra-sentra potensial

- a. Penumbuhan sentra potensial
- b. Perkuatan asosiasi makanan.

b. Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 memiliki target pendapatan dan belanja seperti pada table berikut:

Tabel 2.4
Target Pendapatan Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal PTSP
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	APBD (Rp)	APBD P (Rp)	%
I.	PENDAPATAN			
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	149.360.000	149.360.000	0
	Retribusi IMB	850.640.000	850.640.000	0
	TOTAL PENDAPATAN	1.000.000.000	1.000.000.000	0
II	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung	7.246.877.730	6.995.812.161	(3,46%)
	Belanja Langsung	17.502.266.832	16.671.396.590	(4,75)
	TOTAL BELANJA	24.749.144.562	23.667.208.751	(4,37)

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2019 memiliki target penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2019 memiliki Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 7.246.877.730,- dan mengalami pengurangan sebesar 3,46% menjadi Rp.6.995.812.161,- pada APBD Perubahan.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

- Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 17.502.266.832,- mengalami efisiensi sebesar 4,75% menjadi Rp.16.671.396.590,- pada APBD P Tahun 2019.
- Secara keseluruhan total Belanja pada APBD yaitu Rp.24.749.144.562,- menjadi Rp.23.667.208.751 pada APBD P Tahun 2019.

Pada tahun 2019 DPMPTSPPTK dilaksanakan 13 (tiga belas) program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019. Berikut dapat dijabarkan program dan kegiatan yang mendukung kegiatan internal atau operasional kantor DPMPTSPPTK dan program kegiatan yang mendukung capaian target sasaran DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

- a. Anggaran untuk mendukung pelayanan internal dianggarkan dengan rincian menurut kelompok belanja sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 128.000.000,-
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 12.778.800.000,-
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 73.520.170,-

- b. Anggaran yang mendukung sasaran 1 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Rp. 680.912.080,-

- c. Anggaran yang mendukung sasaran 2 “Meningkatnya peluang investasi” yaitu :

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp. 117.257.700,-
2	Program pengembangan industry kecil dan menengah	Rp. 527.284.500,-
3	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp. 483.496.200,-
4	Program pengembangan sentra-sentra potensial	Rp. 136.045.000,-

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

- d. Anggaran yang mendukung sasaran 3 “Meningkatnya iklim investasi yang kondusif” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Rp.24.975.590,-
2	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Rp. 346.010.415,-

- e. Anggaran yang mendukung sasaran 4 “Meningkatnya kesempatan kerja” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Rp. 133.250.425,-
2	Program peningkatan kesempatan kerja	Rp. 13.685.290
3	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rp. 408.915.220,-

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban kinerja atas target- target kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2019 yang memuat realisasi dari suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, serta analisis akuntabilitas keuangan.

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dilakukan berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Berikut capaian kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86%	79,75%	93%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	8%	16%	200%
3	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3,8	4,11	91%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,5%	6,59%	88%

- a. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Kota Bukittinggi selanjutnya diperoleh indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Dari hasil menunjukkan bahwa masyarakat yang data ke DPMPTSPPTK merasa puas terhadap pelayanan publik dalam terkait perizinan dengan indeks kepuasa sebesar 79,75% (Baik) dari target untuk Tahun 2019 sebesar 86%. Dari penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- Terdapat 1 jenis atribut pelayanan perizinan yang memiliki indeks kepuasan masyarakat yang kurang baik yaitu sarana dan prasarana dengan nilai indeks 2,99
 - Atribut yang memiliki nilai baik terdapat 6 jenis, yaitu:
 - Persyaratan dengan nilai 3,26
 - Sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai 3,18
 - Waktu penyelesaian dengan nilai 3,03

- Produk Layanan dengan nilai 3,05
- Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,08
- Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,13
- Atribut yang memiliki nilai sangat baik yaitu:
 - Biaya/tarif dengan nilai 3,54
 - Penanganan Pengadu dengan nilai 3,52.

Untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan tingkat realisasi 93%, maka dapat dilakukan upaya tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan kepada masyarakat yaitu:

- Pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif guna menunjang pelayanan perizinan sehingga tercipta rasa nyaman bagi masyarakat
 - Menginformasikan kepada masyarakat terkait persyaratan-persyaratan yang baru harus dipenuhi dengan membuat banner dan menempatkan ditempat yang mudah dilihat sehingga informasi dapat dibaca jelas oleh masyarakat
 - Memperbaiki sistem pelayanan agar dapat mempercepat proses
 - Meningkatkan kompetensi petugas dengan cara memberikan training/pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan
 - Memperbaiki prosedur pelayanan dan koordinasi antar unit pelayanan.
- b. Tingkat capaian persentase peningkatan realisasi investasi pada Tahun 2019 mencapai 200% disebabkan realisasi capaian target yang melebihi target yang ditetapkan, yaitu target 8% dan terealisasi 16%. Pada Tahun 2019, nilai investasi Kota Bukittinggi yaitu Rp. 2.556.567.228.535 dengan jumlah investor terdiri dari 480 PMDN dan 1 PMA.
- c. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output (PDRB) yang dihitung dengan data-data tahun lalu pada harga konstan atau bisa juga diartikan dampak dari penambahan investasi terhadap pertumbuhan PDRB. Pada Tahun 2019 ICOR Kota Bukittinggi yaitu 4,11 melebihi target yaitu 3,8. ICOR sebesar 4,11 artinya setiap penambahan Rp.1 Miliar output memerlukan investasi sebesar Rp.4,11 Miliar dan dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di Kota Bukittinggi kurang efisien dalam meningkatkan PDRB.

- d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk tahun 2019 target TPT Kota Bukittinggi sebesar 5,5% dengan realisasi 6,59%. Jumlah pengangguran di Kota Bukittinggi yaitu 4616 dengan rincian pengangguran laki-laki 1875 dan perempuan 2741.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan sasaran strategis dan indikator sasaran untuk tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
DPMPTSPPTK Tahun 2018 dan 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2018					
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	84%	75,50%	88%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	7%	6,31%	90.14%
3	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3.9	4.32	90.28%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5.70%	6,38%	89.34% %
2019					
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86%	79,75%	93%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	8%	16%	200%
3	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3,8	4,11	91%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,5%	6,59%	88%

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan setiap tahun pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sebagai bentuk penilaian kinerja dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat. Pada Tahun 2018 IKM Pelayanan Perizinan sebesar 75,50% dan tahun 2019 sebesar 79,75%. Ada peningkatan sebesar 4,25% hal ini dapat diartikan bahwa DPMPTSPPTK terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan perizinan sehingga masyarakat pengurus izin merasa nyaman, aman dan mudah dalam pengurusan izin dan pengembangan usaha. Disamping peningkatan fasilitas sarana dan prasana pendukung juga ditunjang dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan perizinan.
- b. Persentase peningkatan realisasi investasi juga mengalami peningkatan, untuk tahun 2019 hanya tercapai 6,31% dari target 7%. Berbeda dengan tahun 2019 yang ditarget 8% terealisasi 16%. Kondisi ini didukung dengan promosi penanaman modal yang terus dilaksanakan dan diikuti oleh DPMPTSPPTK baik yang bekerjasama dengan BKPM RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementrian Perindustrian. Selain itu juga didukung dengan kemudahan berusaha, pembinaan dunia usaha melalui Industri Kecil Menengah dan pembekalan pada tenaga kerja di Kota Bukittinggi.
- c. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) pada Tahun 2019 ICOR Kota Bukittinggi yaitu 4,11 melebihi target yaitu 3,8. ICOR sebesar 4,11 artinya setiap penambahan Rp.1 Miliar output memerlukan investasi sebesar Rp.4,11 Miliar dan dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan kegiatan penanaman modal (investasi) yang

dilakukan di Kota Bukittinggi kurang efisien dalam meningkatkan PDRB, tetapi kondisi ini lebih efisien dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018 ICOR Kota Bukittinggi sebesar 4,32, kondisi ini juga kurang efisien.

- d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2018 target TPT sebesar 5,70% dan realisasi 6,38% yang masih berada dibawah target. Untuk tahun 2019 target TPT Kota Bukittinggi sebesar 5,5% dengan realisasi 6,59%. Jumlah pengangguran di Kota Bukittinggi yaitu 4616 dengan rincian pengangguran laki-laki 1875 dan perempuan 2741.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis organisasi yang tertuang dalam Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021 telah memuat target tahunan indikator kinerja DPMPTSPPTK. Target tahunan indikator kinerja disusun dalam Perjanjian Kinerja tahunan, yang diimplementasikan dalam Renja DPMPTSPPTK yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai target pada tahun berjalan. Berikut dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target akhir pada Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021 pada table berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA TAHUN 2019
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86%	90%	79,75%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	8%	10%	16%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA TAHUN 2019
3	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3.8	3.5	4.11
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5.70%	4.93%	6,38%

- a. Target akhir Renstra untuk Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan tahun 2021 sebesar 90%, jika dibandingkan dengan IKM tahun 2019 yaitu sebesar 79,75%, masih terdapat selisih sebesar 10,25%. Selisih ini menjadi tugas bagi DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat. Diharapkan dengan meningkatkan jumlah pelayanan perizinan yang dilayani secara online (melalui OSS, Si Cantik dan SIM BG) dan mulai beroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi akan dapat meningkatkan nilai IKM pelayanan perizinan ini sesuai target akhir Renstra.
- b. Persentase peningkatan realisasi investasi tahun 2019 yang ditarget 8% terealisasi 16%. Nilai ini telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir Renstra sebesar 10%. Walaupun telah melebihi target DPMPTSPPTK akan terus melakukan promosi penanaman modal dan pembinaan dunia usaha sehingga nilai investasi Kota Bukittinggi terus meningkat.
- c. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ditarget pada akhir Renstra sebesar 3,5 artinya diharapkan kegiatan investasi dapat semakin efisien dalam meningkatkan PDRB Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 ICOR Kota Bukittinggi yaitu 4,11 melebihi target yaitu 3,8. Terdapat selisih 0,61 sampai akhir Renstra.
- d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada akhir Renstra tahun 2021 sebesar 4,93%. Sedangkan untuk tahun 2019 target TPT Kota Bukittinggi sebesar 5,5% dengan realisasi 6,59%. Jumlah pengangguran di Kota Bukittinggi yaitu 4616 dengan rincian pengangguran laki-laki 1875 dan perempuan 2741. Realisasi tahun

2019 masih jauh jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. DPMPTSPPTK telah mempersiapkan berbagai bentuk pelayanan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja dan pembinaan perusahaan sehingga diharapkan dapat menekan angka pengangguran di Kota Bukittinggi.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan yang dihadapi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut

Penyebab keberhasilan:

- a. Optimalisasi penggunaan anggaran tahun 2019 dengan penyerapan anggaran mencapai 97,37% dengan rincian 97,18% untuk belanja tidak langsung dan 97,45% untuk Belanja Langsung;
- b. Adanya komitmen semua pejabat struktural dan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
- c. Tahun 2019 hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menggunakan aplikasi berada pada kategori Sangat Baik;
- d. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
- e. Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia;
- f. Menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan ketenagakerjaan.

Penyebab kegagalan:

- a. Ketersediaan SDM pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang masih terbatas secara kuantitas karena ada yang pensiun, mutasi dan promosi dan belum ada gantinya.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan pelayanan berupa hardware dan soft ware pendukung operasional dan pelayanan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek dan diikuti diklat yang terkait dengan pelayanan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan ketenagakerjaan
- b. Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- c. Melakukan percepatan dalam penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- d. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan lebih maksimal dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana yang tersedia

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Selama Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- b. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.
- c. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- d. Melakukan cascading kinerja dalam menyusun program dan kegiatan pada Tahun 2019, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Tahun 2019. Dapat dilihat pada table berikut kegiatan yang dieliminasi sesuai cascading kinerja DPMPTSPPTK :

Tabel 3.5
Efisiensi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	EFISIENSI	KETERANGAN
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama usaha besar dan UKM	14,060,000	Tidak mendukung capaian kinerja
	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi		
	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	43,886,000	Tidak mendukung capaian kinerja
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		
	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku	68,742,600	Tidak mendukung capaian kinerja
	Program penataan struktur industri	35,514,850	
	Kebijakan keterkaitan industri hulu hilir		Tidak mendukung capaian kinerja
	Program peningkatan pelayanan terpadu terhadap masyarakat		
	Pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B	24,705,165	Tidak mendukung capaian kinerja
	Program peningkatan kualiatas dan produktivitas tenaga kerja		
	Pelatihan menjahit	73,353,460	Tidak mendukung capaian kinerja
	Pelatihan elektronika	76,652,960	Tidak mendukung capaian kinerja
	Pelatihan memasak	78,395,010	Tidak mendukung capaian kinerja
	Pelatihan salon	82,228,160	Tidak mendukung capaian kinerja
	JUMLAH	497,538,205	

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

- a. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:
- Capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	
			FISIK	KEUANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	94%	84,44%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	
			FISIK	KEUANGAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	99,60%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	92,14%
4	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor	100%	98,03%
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	100%	78,52%
6	Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase dokumen potensi daerah	100%	96,10%
7	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Tingkat Kelancaran Pelayanan kepada Masyarakat	100%	89,25%
8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Keahlian	100%	87,97%
9	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan	100.00%	85,86%
10	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja	75.00%	80,96%
11	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Penambahan Nilai Penjualan IKM	100%	96,59%
12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha IKM)	100%	96,56%
13	Program Pengembangan Sentra-sentra Potensial	Persentase Peningkatan Pendapatan anggota KUB	100%	97,28%

Dari 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019 jika dilihat dari realisasi fisik pada umumnya berada pada kategori sangat baik bahkan mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi keuangan berada dibawah 100%, kondisi ini disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1) Program Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk memenuhi tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran, terdiri atas 12

kegiatan. Sehingga pemenuhan sarana prasana pendukung dapat terlaksana. Anggaran yang alokasi untuk mendukung program ini yakni sebesar Rp.947.244.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.799.845.113,- (84,44%).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur pada DPMPTSPPTK terdiri atas 3 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.12.778.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.727.472.655,- dan realisasi mencapai angka 99,60%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimtek, didukung dengan 1 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.73.520.170,- dengan realisasi sebesar Rp.67.737.861,- dan tingkat realisasi 94,14%.

4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah investasi baik PMDN dan PMA ke Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.117.257.700,- dengan realisasi sebesar Rp.92.067.000,- dan realisasi mencapai angka 78,52%, didukung dengan 1 kegiatan.

5) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah investor yang datang ke Kota Bukittinggi untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha yang didukung dengan 1 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.24.975.590,- dengan realisasi sebesar Rp.24.483.750,- dan realisasi mencapai angka 98,03%.

6) Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatnya informasi dan data potensi investasi daerah Kota Bukittinggi, terdiri atas 1 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 346.010.415,- dengan realisasi sebesar Rp.332.504.432,- (96,10%).

7) Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dengan 13 kegiatan, dalam hal ini terkait pelayanan perizinan bidang penanaman modal. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.680.912.080,- dengan realisasi sebesar Rp.607.697.698,- dan tingkat realisasi mencapai angka 89,25%. Di dalam program ini didukung dengan 13 kegiatan.

- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja. Program ini dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan jenis pelatihan dan pembinaan yang diberikan untuk pencari kerja di Kota Bukittinggi. Kegiatan ini didukung dengan 8 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.408.915.220,- dengan realisasi sebesar Rp.359.707.210,- dan tingkat realisasi mencapai angka 87,97%.
- 9) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penempatan pencari kerja di Kota Bukittinggi dan didukung dengan 1 kegiatan. Anggaran yang alokasi untuk mendukung program ini Rp.13.685.290,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.11.097.000 (80,96%).
- 10) Program Perlindungan Pengembalian Lembaga Ketenagakerjaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga terjalin hubungan yang baik antara pekerja dan pemilik perusahaan. Program ini memiliki 5 kegiatan. Dengan anggaran yang alokasi untuk mendukung program ini yakni sebesar Rp.133.250.424,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.114.407.864,- (85,86%).
- 11) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah industri kecil yang berkembang, yang dapat dilihat dari perkembangan unit usahanya. Program ini memiliki 3 kegiatan penunjang. Program ini dilakukan dengan berbagai macam bentuk pembinaan dan fasilitasi terhadap IKM yang ada di Kota

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 527.284.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 509.165.679,- dan realisasi mencapai angka 96,56%.

12) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai penjualan industri kecil menengah dengan memberikan pembinaan dan fasilitasi dalam pengembangan industri. Program ini memiliki 4 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar 483.496.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 467.030.924,- dan tingkat realisasi mencapai angka 96,59%.

13) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota KUB (Kelompok Usaha Bersama). Program ini mendapat alokasi dana sebesar 136.045.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 132.342.751,- dan realisasi mencapai angka 97,28%, dengan kegiatan pendukung sebanyak 2 kegiatan.

b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Fisik	Keuangan
1	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah materai 3000; jumlah materai 6000; jumlah buku cek; jumlah jasa paket pengiriman	100%	76.20%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon; rekening listrik; rekening air dan pembayaran speedy	100%	82.42%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	100%	74.19%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis alat kebersihan yang diadakan; jumlah petugas kebersihan	100%	72.85%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	98.48%
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	100.00%	79.78%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak; jumlah dokumen yang digandakan; jumlah dokumen yang dijilid	100%	76.67%
8	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah peralatan listrik terbeli	27%	3.90%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Fisik	Keuangan
	listrik/penerangan bangunan kantor			
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	100%	42.06%
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	Persentase pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	100%	98.99%
11	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS dan iuran jasa BPJS	100%	98.87%
12	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK	100%	80.68%
14	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	100%	95.83%
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelaksanaan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilaksanakan	100.00%	99.63%
16	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	100.00%	99.61%
17	Peningkatan kualitas SDM ginas Peningkatan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	92.14%
18	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	100.00%	98.03%
19	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan luar Negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	100.00%	78.52%
20	Kajian Penanaman Modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	100.00%	96.10%
21	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Jumlah tenaga FO pelayanan perizinan; jumlah tenaga teknis perizinan	100%	97.47%
22	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah perizinan sektor A yang diterbitkan	49%	99.27%
23	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	16.7%	90.61%
24	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	77.42%
25	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jumlah perizinan yang dikelola secara online	100.0%	82.89%
26	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Laporan Perizinan yang diterbitkan	100%	81.62%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Fisik	Keuangan
27	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	65.70%	98.51%
28	Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan	109.50%	81.27%
29	Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan yang valid jumlah SK perizinan yang telah diterbitkan	94.12%	82%
30	Tim Koordinasi Perizinan	laporan pelaksanaan koordinasi perizinan	100.00%	71%
31	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)	100.00%	94%
32	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan perizinan secara online	88.23%	90%
33	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	160.00%	92.50%
34	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta kewirausahaan	100%	66%
35	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina	100%	98.41%
36	Pelatihan Pembuatan Bed Cover	Jumlah peserta pelatihan pembuatan bed cover	100%	94.51%
37	Monev Eks Siswa Pelatihan	Laporan monev ex siswa pelatihan	100%	82%
38	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	100%	92%
39	Pelatihan Pembuatan Dendeng Singkong	Jumlah peserta pelatihan dendeng singkong	100%	81%
40	Pelatihan Modeste Dasar Untuk Pemula	Jumlah peserta pelatihan modeste dasar untuk pemula	100%	99%
41	Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah kasus PHK yang tertangani	120.0%	91.33%
42	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin	230%	28%
43	Asistensi dan Pembinaan Peratuan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Laporan asistensi PP dan PKB di perusahaan	270%	52%
44	Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan	Jumlah posko khusus ketenagakerjaan	100%	99%
45	Peningkatan kualitas pegawai teknis ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti	100%	96%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Fisik	Keuangan
46	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan informasi pasar kerja	100%	80,96%
47	Pengembangan dan pelayannya teknologi industry	JUmlah peserta sosialisasi; jumlah IKM yang difasilitasi label halal; Jumlah IKM yang difasilitasi packing	100%	99%
48	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industry	Pelaksanaan penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industry	100%	96,1%
49	Pelatihan rendo koto gadang	Jumlah peserta pelatihan	100%	100%
50	Perkuatan organisasi mantra UPTD kerajinan	Organisasi mitra UPTD yang difasilitasi	100%	95,85%
51	Fasilitasi bagi industry kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat mahir	100%	85,16%
52	Pembinaan industry kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industry	Jumlah peserta magang membuat; jumlah IKM bimtek AMT; Jumlah pameran yang diikuti	100%	98,77%
53	Rencana Pembangunan INdustri Kota (RPIK) Bukittinggi	Jumlah dokumen RPIK Bukittinggi	100%	94,15%
54	Penumbuhan sentra potensial	Jumlah IKM yang mengikuti pameran hasil sentra; jumlah pameran yang diikuti; lamanya pelaksanaan pameran	100%	99,9%
55	Perkuatan asosiasi makanan	Jumlah asosiasi pangan yang dibina; jumlah pameran pangan yang diikuti	100%	92,9%

Dari uraian di atas dapat diperoleh bahwa 55 (lima puluh lima) kegiatan semuanya mendukung keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, meskipun ada beberapa capaian fisik yang masih kurang 100%. Untuk capaian kinerja keuangan yang kurang 100% pada umumnya merupakan sisa lebih pelaksanaan kegiatan yang disebabkan adanya efisiensi dalam penyerapan anggaran.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Pada Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 memiliki target dan realisasi pendapatan dan belanja seperti pada table berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan
Belanja Pada Dinas Penanaman Modal PTSP
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN			
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	149.360.000	185.426.550	124,15%
	Retribusi IMB	850.640.000	638.695.260,75	75,08%
	TOTAL PENDAPATAN	1.000.000.000	824.121.810,75	82,41%
II	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung	6.995.812.161	6.798.290.755	97,18%
	Belanja Langsung	16.671.396.590	16.245.541.937	97,45%
	TOTAL BELANJA	23.667.208.751	23.043.832.692	97,37%

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.824.121.810,75,- (82,41%) dari target sebesar Rp.1.000.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp.6.995.812.161,- dengan realisasi sebesar Rp.6.798.290.755,- (97,18%) serta Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp.16.671.396.590,- dengan realisasi sebesar Rp.16.245.541.937,- (97,45%). Secara keseluruhan total Belanja yaitu Rp.23.667.208.751 dengan realisasi Rp.23.043.832.692,- (97,37%). Pada tahun 2019 DPMPTSPPTK telah melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

Realisasi anggaran dan fisik secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
**Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENDAPATAN					1,000,000,000	824,121,810.75	82.41%	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					149,360,000	185,426,550.00	124.15%	
	Sewa Pemakaian Alat Berat/Mesin					149,360,000	185,426,550.00	124.15%	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					850,640,000	638,695,260.75	75.08%	
	-Retribusi IMB					850,640,000	638,695,260.75	75.08%	
	BELANJA					23,667,208,751	23,043,832,692	97.37%	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					6,995,812,161	6,798,290,755	97.18%	
	Belanja Pegawai					6,995,812,161	6,798,290,755	97.18%	
	- Belanja Gaji dan Tunjangan					4,257,812,161	4,186,161,493	98.32%	
	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS					2,688,000,000	2,598,281,462	96.66%	
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					50,000,000	13,847,800	27.70%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LANGSUNG					16,671,396,590	16,245,541,937	97.45%	
	Non Urusan								
	Penunjang Urusan Pemerintah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	94%	94%	947,244,000	799,845,113	84.44%	
1	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah materai 3000; jumlah materai 6000; jumlah buku cek; jumlah jasa paket pengiriman	175 bh; 230 bh; 3 bh; 12 bln	175 bh; 230 bh; 3 bh; 12 bln	100%	2,500,000	1,905,000	76.20%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon; rekening listrik; rekening air dan pembayaran speedy	48 rek/ 12 bulan	48 rek/ 12 bulan	100%	80,000,000	65,932,132	82.42%	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	8 unit roda 4 & 14 unit roda 2	8 unit roda 4 & 14 unit roda 2	100%	213,000,000	158,014,250	74.19%	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis alat kebersihan yang diadakan; jumlah petugas kebersihan	25 jenis; 2 org/8 bulan	25 jenis; 2 org/8 bulan	100%	84,910,000	61,861,000	72.85%	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket/12 bulan	1 paket/12 bulan	100%	10,000,000	9,848,400	98.48%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	37 jenis	37 jenis	100.00%	21,744,000	17,348,000	79.78%	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak; jumlah dokumen yang digandakan; jumlah dokumen yang dijilid	8 jenis; 50640 lembar; 90 dokumen	8 jenis; 50640 lembar; 90 dokumen	100%	35,400,000	27,139,580	76.67%	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	11 jenis	3 jenis	27%	5,000,000	195,000	3.90%	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	12 bulan	12 bulan	100%	40,000,000	16,824,100	42.06%	
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	Persentase pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	90%	100%	260,000,000	257,380,491	98.99%	
11	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS dan iuran jasa BPJS	5 org/12 bln	5 org/12 bln	100%	144,690,000	143,058,160	98.87%	
12	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK	4 paket	4 paket	100%	50,000,000	40,339,000	80.68%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100.00%	12,778,800,000	12,727,472,655	99.60%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	2 jenis	100%	28,800,000	27,600,000	95.83%	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelaksanaan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100.00%	40,350,000	40,202,000	99.63%	
3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 gedung	1 gedung	100.00%	12,709,650,000	12,659,670,655	99.61%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	73,520,170	67,737,861	92.14%	
1	Peningkatan kualitas SDM ginas Peningkatan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	10 orang	10 orang	100%	73,520,170	67,737,861	92.14%	
	Urusan Wajib								
	Penanaman Modal								
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor	100	100	100.0%	24,975,590	24,483,750	98.03%	
1	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	24,975,590	24,483,750	98.03%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	45%	45.00%	100.00%	117,257,700	92,067,000	78.52%	
1	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan luar Negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	1 kali	1 kali	100.00%	117,257,700	92,067,000	78.52%	
	Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase dokumen potensi daerah	45%	45.00%	100.00%	346,010,415	332,504,432	96.10%	
1	Kajian Penanaman Modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	346,010,415	332,504,432	96.10%	
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Tingkat Kelancaran Pelayanan kepada Masyarakat	100	91.00%	91.00%	680,912,080	607,697,698	89.25%	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Jumlah tenaga FO pelayanan perizinan; jumlah tenaga teknis perizinan	4 org/12 bln; 2 orang/12 bulan	4 org/12 bln; 2 orang/12 bulan	100%	155,524,240	151,594,090	97.47%	
2	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah perizinan sektor A yang diterbitkan	2500 izin	1221 izin	49%	67,090,680	66,598,581	99.27%	
3	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	30 kasus	5 kaus	16.7%	23,063,240	20,898,400	90.61%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	2 dokumen	2 dokumen	100%	31,775,000	24,599,735	77.42%	
5	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jumlah perizinan yang dikelola secara online	86 jenis	86 jenis	100.0%	48,596,200	40,281,556	82.89%	
6	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Laporan Perizinan yang diterbitkan	48 laporan	48 laporan	100%	22,575,000	18,426,416	81.62%	
7	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	3000 berkas izin	1971 berkas izin	65.70%	21,980,000	21,651,450	98.51%	
8	Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan	1200 izin	1314 izin	109.50%	105,200,000	85,498,650	81.27%	
9	Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan yang valid jumlah SK perizinan yang telah diterbitkan	85%	80%	94.12%	36,284,020	29,667,350	82%	
10	Tim Koordinasi Perizinan	laporan pelaksanaan koordinasi perizinan	1 laporan	1 laporan	100.00%	33,783,900	24,155,198	71%	
11	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)	85%	85%	100.00%	57,827,300	54,338,822	94%	
12	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan perizinan secara online	3000 berkas izin	1971 izin	88.23%	51,537,000	46,236,750	90%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	30 kali	48 kali	160.00%	25,675,500	23,750,700	92.50%	
	Tenaga Kerja								
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Keahlian	65%	65%	100.00%	408,915,220	359,707,210	87.97%	
1	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta kewirausahaan	16 org/9 hari	16 org/9 hari	100%	54,885,900	36,202,900	66%	
2	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina	10 lembaga latihan swasta	10 lembaga latihan swasta	100%	25,714,000	25,305,260	98.41%	
3	Pelatihan Pembuatan Bed Cover	Jumlah peserta pelatihan pembuatan bed cover	16 orang	16 orang	100%	85,277,660	80,599,250	94.51%	
4	Monev Eks Siswa Pelatihan	Laporan monev ex siswa pelatihan	1 laporan	1 laporan	100%	3,068,000	2,519,550	82%	
5	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	20 orang	20 orang	100%	23,117,900	21,234,650	92%	
6	Pelatihan Montir Sepeda Motor	Jumlah peserta pelatihan montir sepeda motor	16 orang	16 orang	100%	100,157,000	84,882,400	85%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pelatihan Pembuatan Dendeng Singkong	Jumlah peserta pelatihan dendeng singkong	16 orang	16 orang	100%	39,401,150	32,062,750	81%	
8	Pelatihan Modeste Dasar Untuk Pemula	Jumlah peserta pelatihan modeste dasar untuk pemula	16 orang	16 orang	100%	77,293,610	76,900,450	99%	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan	70%	70%	100.00%	133,250,425	114,407,864	85.86%	
1	Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah kasus PHK yang tertangani	30 kasus	36 kasus	120.0%	25,931,850	23,684,210	91.33%	
2	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin	10 perusahaan	23 perusahaan	230%	11,209,850	3,142,050	28%	
3	Asistensi dan Pembinaan Peratuan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Laporan asistensi PP dan PKB di perusahaan	10 laporan	27 laporan	270%	11,092,750	5,732,750	52%	
4	Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan	Jumlah posko khusus ketenagakerjaan	1 posko	1 posko	100%	4,865,975	4,833,975	99%	
5	Peningkatan Kualitas Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti	4 kali	4 kali	100%	80,150,000	77,014,879	96%	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja	19%	13%	75.00%	13,685,290	11,079,000	80.96%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan informasi pasar kerja	12 dokumen	12 dokumen	100%	13,685,290	11,079,000	80.96%	
	Urusan Pilihan								
	Industri								
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Penambahan Nilai Penjualan IKM	4%	4%	100.00%	483,496,200	467,030,924	96.59%	
1	Pengembangan & pelayanan teknologi industri	Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah IKM yang difasilitasi label halal; Jumlah IKM yang difasilitasi packing	25 orang, 5 IKM, 5 IKM	25 orang, 5 IKM, 5 IKM	100%	39,450,000	39,121,500	99%	
2	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industry	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industry	12 bulan	12 bulan	100%	150,531,200	144,722,370	96.1%	
3	Pelatihan Rendo Koto Gadang	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	20 orang	100%	44,835,000	44,835,000	100%	
4	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan	Organisasi mitra UPTD yang difasilitasi	1 organisasi	1 organisasi	100%	248,680,000	238,352,054	95.85%	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha IKM)	15	15	100.00%	527,284,500	509,165,679	96.56%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat mahir	20 orang	20 orang	100%	19,864,500	16,916,150	85.16%	
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry	Jumlah peserta magang membuat; Jumlah IKM Bimtek AMT; Jumlah pameran yang diikuti	5 orang; 20 orang; 2 event	5 orang; 20 orang; 2 event	100%	298,000,000	294,332,479	98.77%	
3	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi	Jumlah dokumen RPIK Bukittinggi	2 dokumen (naskah akademik dan RPIK)	2 dokumen (naskah akademik dan RPIK)	100.00%	209,420,000	197,917,050	94.51%	
	Program Pengembangan Sentra-sentra Potensial	Persentase Peningkatan Pendapatan anggota KUB	4%	4%	100%	136,045,000	132,342,751	97.28%	
1	Penumbuhan sentra potensial	Jumlah IKM yang mengikuti pameran hasil sentra; jumlah pameran yang diikuti; lamanya pelaksanaan pameran	5 IKM, 1 pameran, 5 hari	5 IKM, 1 pameran, 5 hari	100%	85,265,000	85,159,239	99.9%	
2	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah asosiasi pangan yang dibina; jumlah pameran pangan yang diikuti	1 asosiasi; 1 event	1 asosiasi; 1 event	100%	50,780,000	47,183,512	92.9%	
	TOTAL BTL dan BL					23,667,208,751	23,043,832,692	97.37%	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan penyediaan jasa surat menyurat yang ditargetkan 175 buah materai 3000, 230 buah materai 6000 dan jasa pengiriman surat selama 12 bulan, untuk capaian kinerja terealisasi 100%, maka alokasi dana sebesar Rp.2.500.000,- tereliasasi Rp.1.905.000,- dengan realisasi keuangan 76,20%.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rekening yang terbayar ditargetkan 48 rekening selama 12 bulan, yang merupakan rekening listrik, PDAM, telepon dan langganan speedy. Terealisasi 48 rekening selama 12 bulan, maka alokasi dana sebesar Rp.80.000.000,- terealisasi Rp.65.932.132,- dengan realisasi keuangan 82.42% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dilakukan pemeliharaan ditargetkan 8 unit roda 4 dan 14 unit roda 2 terealisasi 8 unit roda 4 dan 14 unit roda 2, maka alokasi dana sebesar Rp.213.000.000,- terealisasi Rp.158.014.250,- dengan realisasi keuangan 74,19% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih yang dapat dibeli ditargetkan 1 paket jasa kebersihan, 25 jenis untuk 12 bulan terealisasi 1 paket jasa kebersihan, 25 jenis untuk 12 bulan, maka alokasi dana sebesar Rp.84.910.000,- terealisasi Rp.61.861.000,- dengan realisasi keuangan 72,85% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor yang ditargetkan sebanyak 1 paket teralisasi 1 paket, maka alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi Rp.9.848.400,- dengan realisasi keuangan 98,48% dan realisasi fisik 100%.
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah alat tulis yang dibeli ditargetkan sebanyak 37 jenis terealisasi 37 jenis, maka alokasi dana sebesar Rp.21.744.000,- terealisasi Rp.17.348.000,- dan realisasi 79,78% dengan realisasi fisik 100%.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fotocopy dan penggandaan yang dilaksanakan dengan target 8 jenis, 50640 lembar penggandaan dan 90 jilid dan terealisasi 8 jenis, 50640 fotocopy dan 80 jilid, maka alokasi dana sebesar Rp.35.400.000,- terealisasi Rp.21.139.580,- dengan realisasi keuangan 76,67% dan realisasi fisik 85%. Tidak optimalnya realisasi anggaran pada kegiatan ini disebabkan pelaksanaan fotocopy dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan DPMPTSPPTK khususnya Sekretariat selama 1 tahun.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peralatan listrik yang terbeli dengan target 11 jenis terealisasi 3 jenis, maka alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- terealisasi Rp.195.000,- dengan realisasi 3,90% dan realisasi fisik 27%. Tidak optimalnya realisasi anggaran dan fisik pada kegiatan ini disebabkan penyediaan alat listrik atau penerangan sesuai pada kebutuhan DPMPTSPPTK yang saat ini berkantor sementara pada ex. Dinas Satpol PP Kota Bukittinggi.
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase rapat, tamu, lembur yang tersedia makan dan minumannya ditargetkan untuk 12 bulan terealisasi 12 bulan, maka alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,- terealisasi Rp.16.824.100,- dengan realisasi keuangan 42,07% dan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi keuangan untuk kegiatan ini disebabkan oleh kebutuhan dari DPMPTSPPTK selama tahun 2019 juga rendah dalam pemenuhan makanan dan minuman.
- 10) Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase rapat yang diikuti/dihadiri selama 1 tahun ditargetkan 90% terealisasi 90%, maka alokasi dana sebesar Rp.360.000.000,- terealisasi Rp.257.380.491,- dengan realisasi 98,99% dan realisasi fisik 100%.
- 11) Penyediaan Jasa Non PNS. Indikator kinerja kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan iuran jasa BPJS untuk Non PNS ditargetkan untuk 5 orang 12 bulan terealisasi 5 orang 12 bulan, maka alokasi dana sebesar Rp.144.690.000,- terealisasi Rp.143.058.160,- dengan realisasi keuangan 98,87% dan realisasi fisik 100%.

- 12) Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK ditargetkan 4 paket terealisasi 4 paket, maka alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi Rp.40.339.000,- dan realisasi keuangan 80,68% dan realisasi fisik 100%.
- 13) Pengadaan Peralatan Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jenis peralatan kantor yang diadakan dengan target sebanyak 2 jenis terealisasi 2 jenis, maka alokasi dana sebesar Rp.28.800.000,- terealisasi Rp.27.600.000,- dengan realisasi 95,83% dan realisasi fisik 100%.
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan dengan target sebanyak 1 gedung terpelihara terealisasi 1 gedung, maka alokasi dana sebesar Rp.40.350.000,- terealisasi Rp.40.202.000,- dengan realisasi keuangan 99,63% dan realisasi fisik 100%.
- 15) Pembangunan Gedung Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) yang dibangun dengan target 1 dokumen. Terealisasi 1 dokumen. Untuk ini telah alokasi dana sebesar Rp.12.709.650.000,- dengan realisasi Rp.12.659.670.655,-. Maka realisasi keuangan sebesar 99,61% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pembangunan Gedung kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) dilaksanakan 2 tahap, tahun 2019 merupakan tahap awal dan tahap 2 pada tahun 2020.
- 16) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Investasi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, ditargetkan sebanyak 10 orang terealisasi 10 orang, dengan alokasi dana sebesar Rp.73.520.170,- terealisasi Rp.67.737.861,- dengan tingkat realisasi keuangan 92,14% dan tingkat realisasi fisik 100%.
- 17) Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pameran investasi yang diikuti, yang ditargetkan sebanyak 1 kali terealisasi 1 kali, maka alokasi dana sebesar Rp.117.257.700,- terealisasi Rp.92.067.000,- dengan realisasi keuangan 78,52% dan realisasi fisik 100%.
- 18) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen peningkatan kegiatan penanaman modal dengan target

1 dokumen, maka alokasi dana sebesar Rp.24.975.590,- terealisasi Rp.24.483.750,- dengan realisasi keuangan 98,03% dan realisasi fisik 100%.

- 19) Kajian Penanaman Modal. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang disusun dengan target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen (100%). Alokasi dana sebesar Rp.346.010.415,- dengan terealisasi Rp.332.504.432,- dengan tingkat realisasi 96,10%.
- 20) Kegiatan Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaporan dokumentasi perizinan yang dilakukan dengan target 48 laporan terealisasi 48 laporan, maka alokasi dana sebesar Rp.22.575.000,- terealisasi Rp.18.426.416,- dengan realisasi keuangan 81,62% dan realisasi fisik 100%.
- 21) Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jenis izin yang dikelola secara online dalam pelayanan perizinan pada DPMPTSPPTK dengan target 86 jenis izin terealisasi 81 jenis izin, maka alokasi dana sebesar Rp.48.596.200,- terealisasi Rp.40.281.556,- dengan realisasi keuangan 82,89% dan realisasi fisik 94,2%.
- 22) Kegiatan Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan. Kegiatan ini memiliki indikator tingkat pemenuhan informasi perizinan pada media cetak, media elektronik dll) sebesar 85% terealisasi 85% dalam berbagai macam informasi terkait layanan perizinan pada DPMPTSPPTK. Untuk kegiatan ini telah alokasi anggaran Rp.57.827.300,- dengan realisasi Rp.54.338.822,-. Maka tingkat realisasi keuangan adalah 94% dan tingkat realisasi fisik sebesar 100%.
- 23) Kegiatan Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah peraturan perizinan yang tersusun dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, maka alokasi dana sebesar Rp.31.775.000,- terealisasi Rp.24.599.735,- dengan tingkat realisasi keuangan 77,42% dan tingkat realisasi fisik 100%.
- 24) Kegiatan Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi dengan target 3000 berkas izin terealisasi 1971 izin, maka alokasi dana sebesar Rp.21.980.000,- terealisasi Rp.21.651.450,-. Maka

tingkat realisasi keuangan adalah 98,51% dan tingkat realisasi fisik 65,70%.

- 25) Kegiatan Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengaduan terkait izin yang telah diterbitkan, diproses dan tertangani dengan baik dengan target 30 kasus terealisasi 5 kasus, maka alokasi dana sebesar Rp.23.063.240,- terealisasi Rp.20.898.400,- dengan realisasi keuangan 90,61% dan realisasi fisik 16,7%. Tidak optimalnya capaian kinerja disebabkan pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada jumlah kasus pengaduan perizinan yang masuk ke DPMPTSPPTK selama 1 tahun.
- 26) Kegiatan Pelayanan Perizinan Sektor A. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah surat izin umum yang diterbitkan dengan target 2500 surat izin terealisasi 1221 surat izin, maka alokasi dana sebesar Rp.67.090.680,- terealisasi Rp.66.598.581,- dan realisasi keuangan 99,27% dengan realisasi fisik 49%. Tidak optimalnya capaian kinerja fisik disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelayanan perizinan umum yang bergantung pada pengajuan izin umum dari masyarakat. Solusinya akan terus ditingkatkan sosialisasi perizinan terhadap masyarakat melalui berbagai media.
- 27) Kegiatan Pelayanan Perizinan I Sektor B. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah surat izin teknis yang diterbitkan dengan target 1200 surat izin terealisasi 1341 surat izin, maka alokasi dana sebesar Rp.105.200.000,- terealisasi Rp.85.498.650,- dan tingkat realisasi anggaran 81,27% dengan realisasi fisik 109,5%.
- 28) Kegiatan Pelayanan Perizinan II Sektor B. Indikator kinerja kegiatan ini adalah tingkat ketersediaan SK perizinan yang valid, ditargetkan sebesar 85% dan telah terealisasi 85%. Untuk kegiatan ini alokasi dana sebesar Rp.36.284.020,- terealisasi Rp.29.667.350,-. Maka tingkat realisasi keuangan 82% dan tingkat realisasi fisik 100%.
- 29) Tim Koordinasi Perizinan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jumlah dokumen hasil koordinasi mengenai perizinan dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, maka alokasi dana sebesar Rp.33.783.900,- terealisasi Rp.29.667.350,- dan tingkat realisasi anggaran 71% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 30) Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa laporan berkas perizinan secara online

sebanyak 3000 berkas izin, telah dilaksanakan sebanyak 1971 berkas izin. Untuk pelaksanaannya telah dianggarkan dana sebesar Rp.51.537.000,- dengan realisasi Rp.46.236.750,-. Maka tingkat realisasi keuangan 90% dan tingkat realisasi fisik 88,23%.

- 31) Kegiatan Pengawasan Tempat Usaha. Indikator kinerja kegiatan ini adalah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik untuk melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang belum memiliki izin usaha dengan target 30 kali terealisasi 48 kali, maka alokasi dana sebesar Rp.25.675.500,- terealisasi Rp.23.750.700,- dan realisasi 92,50% dengan realisasi fisik 160%.
- 32) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tenaga Front Office (FO) Perizinan selama 12 bulan yaitu sebanyak 4 orang dan tenaga Back Office (BO) perizinan sebanyak 2 orang. Telah terealisasi 4 orang/ 12 bulan FO dan 2 orang/12 bulan BO. Untuk kegiatan ini telah dianggarkan dana Rp.155.524.240,- terealisasi Rp.151.594.090,-. Maka tingkat realisasi keuangan 97,47% dan tingkat realisasi fisik 100%.
- 33) Pelatihan Kewirausahaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dengan target 16 orang selama 9 hari, telah terealisasi dalam pelaksanaannya 16 orang selama 9 hari. Maka alokasi dana sebesar Rp.54.885.900,- terealisasi Rp.36.202.900,- dan tingkat realisasi keuangan 66% dengan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran pada kegiatan ini merupakan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan, karena peserta telah memperoleh pekerjaan sehingga tidak perlu melakukan magang.
- 34) Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta. Indikator kinerja kegiatan ini adalah laporan koordinasi dan monitoring yang dilakukan terhadap Lembaga Latihan Swasta (LLS), dengan tergaet 1 laporan dengan 10 LLS. Maka alokasi dana sebesar Rp.25.714.000,- terealisasi Rp.25.305.260,- dan tingkat realisasi keuangan 98,41% dengan realisasi fisik 100%.
- 35) Pelatihan Pembuatan Bed Cover. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan pembuatan bed cover sebanyak 16 orang. Telah terealisasi sebanyak 16 orang untuk dalam pelaksaian kegiatan. Maka alokasi dana sebesar Rp.85.277.660,- terealisasi Rp.80.599.250,- dan tingkat realisasi keuangan 94,51% dengan realisasi fisik 100%.

- 36) Pelatihan Moneyv Eks Siswa Pelatihan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan monen eks siswa pelatihan dengan target 1 laporan. Telah terealisasi sebanyak 1 laporan moneyv eks siswa pelatihan. Maka alokasi dana sebesar Rp.3.068.000,- terealisasi Rp.2.519.550,- dan tingkat realisasi keuangan 82% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 37) Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan instruktur Lembaga latihan swasta dengan target 20 orang. Telah terealisasi sebanyak 20 orang peserta dalam pelaksanaan kegiatan. Maka alokasi dana sebesar Rp.23.117.900,- terealisasi Rp.21.234.650,- dan tingkat realisasi keuangan 92% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 38) Pelatihan Montir Sepeda Motor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan montir sepeda motor dengan target 16 orang. Telah terealisasi sebanyak 16 orang peserta pelatihan montir sepeda motor dalam pelaksanaan kegiatan. Maka alokasi dana sebesar Rp.100.157.000,- terealisasi Rp.84.882.400,- dan tingkat realisasi keuangan 85% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 39) Pelatihan Pembuatan Dendeng Singkong. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan pembuatan dendeng singkong dengan target 16 orang. Maka alokasi dana sebesar Rp.39.401.150,- terealisasi Rp.32.062.750,- dan tingkat realisasi keuangan 81% dengan realisasi fisik 100%.
- 40) Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan modeste dasar untuk pemula. Telah ditargetkan sebanyak 16 orang peserta dan tercapai 16 orang peserta dalam pelaksanaan pelatihan. Maka alokasi dana sebesar Rp.77.293.610,- terealisasi sebesar Rp.76.900.450,- dan tingkat realisasi keuangan 99% dan tingkat realisasi fisik sebesar 100%.
- 41) Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja. Indikator kinerja kegiatan Pelayanan dan Penempatan tenaga Kerja adalah jumlah laporan penempatan tenaga kerja sebanyak 12 laporan selama 1 tahun, maka alokasi dana sebesar Rp.13.685.290,- terealisasi sebesar Rp.12.410.800,- dengan tingkat realisasi fisik 100% dan tingkat realisasi keuangan 80,96%.
- 42) Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Indikator kinerja kegiatan ini adalah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

yang diproses dengan target sebanyak 30 kasus tercapai 36 kasus. Maka alokasi dana sebesar Rp.25.931.850,- dan realisasi Rp.23.684.210,- dengan tingkat realisasi fisik 120% dan realisasi keuangan 93,98%. Tingginya tingkat realisasi fisik karena pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada kasus PHI yang terselesaikan.

- 43) Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin dengan target 10 perusahaan dan terealisasi sebanyak 23 perusahaan pada pelaksanaan kegiatan ini. Maka alokasi dana sebesar Rp.11.209.850,- dan realisasi keuangan Rp.3.142.050,- (28%) dengan realisasi fisik 230%. Rendahnya tingkat realisasi keuangan disebabkan efisiensi dalam penyerapan anggaran belanja kegiatan ini.
- 44) Asistensi dan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Indikator kinerja kegiatan ini adalah laporan asistensi dan pembinaan penyusunan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dengan target kinerja 10 dan tercapai 27 laporan pembinaan. Maka alokasi dana sebesar Rp.11.092.750,- dan realisasi Rp.5.732.750,- (52%) dengan tingkat realisasi fisik 270%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan asistensi pada perusahaan dapat berupa permintaan dari perusahaan dan turun ke lapangan.
- 45) Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan. Kegiatan ini memiliki indikator jumlah posko khusus ketenagakerjaan sebanyak 1 posko, yang dilaksanakan pada hari buruh. Maka alokasi dana sebesar Rp.4.865.975,- dengan realisasi Rp.4.833.975,-. Maka tingkat realisasi keuangan sebesar 99% dan fisik 100%.
- 46) Peningkatan Kualitas Pegawai Teknis Ketenagakerjaan. Kegiatan ini memiliki indikator jumlah diklat teknis ketenakerjaan yang diikuti oleh SDM bidang tenaga kerja, dengan target sebanyak 4 diklat dan telah terealisasi 4 diklat. Maka alokasi dana sebesar Rp.80.150.000,- terealisasi Rp.77.014.879,- dengan tingkat realisasi keuangan 96% dan tingkat realisasi fisik 100%.
- 47) Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mendapat fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya produksi yaitu

peserta pelatihan border tingkat mahir, pesertanya berasal dari IKM dengan target 20 orang terealisasi 20 orang, maka alokasi dana sebesar Rp.19.864.500,- terealisasi Rp.16.916.150,- dan tingkat realisasi keuangan 85,16% dengan tingkat realisasi fisik 100%.

- 48)Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta magang membuat batik sebanyak 5 orang; jumlah IKM yang mengikuti bimtek AMT sebanyak 20 orang dan jumlah pameran yang diikuti sebanyak 2 event. Maka alokasi dana sebesar Rp.298.000.000,- terealisasi Rp.294.332.479,- dan tingkat realisasi keuangan 98,77% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 49)Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen RPIK Bukittinggi yang disusun, sebagai pedoman dalam pengembangan industri kecil menengah di Kota Bukittinggi, ditarget sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen naskah akademik RPIK yang akan diperdakan pada tahun 2020. Maka alokasi dana Rp.209.420.000,- terealisasi Rp.197.917.050,- dan tingkat realisasi keuangan 94,51% dan tingkat realisasi fisik 100%.
- 50)Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi sebanyak 25 orang; jumlah IKM yang difasilitasi label halal sebanyak 5 IKM dan jumlah IKM yang difasilitasi packing sebanyak 5 IKM terealisasi 25 IKM peserta sosialisasi dan 5 IKM yang difasilitasi packing serta 5 IKM yang difasilitasi label halal maka alokasi dana sebesar Rp.39.450.000,- terealisasi Rp.39.121.500,- dan tingkat realisasi keuangan 99% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 51)Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemenuhan penyelenggaraan operasional UPTD Kerajinan Industri dengan target 12 bulan terealisasi 12 bulan, maka alokasi dana sebesar Rp.150.531.200,- terealisasi Rp.144.722.370,- dan tingkat realisasi keuangan 96,1% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 52)Pelatihan Rendo Koto Gadang. Kegiatan ini memiliki indikator jumlah peserta pelatihan kerajinan bambu yang ditargetkan sebanyak 20 orang. Dalam pelaksanaan pelatihan ini telah terealisasi 20 orang. Kegiatan ini

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

alokasi dana Rp.68.742.600,- dengan realisasi Rp.60.798.500,-. Maka realisasi keuangan 88,01% dan fisik 100%.

- 53) Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri. Kegiatan ini memiliki indikator yaitu jumlah organisasi mitra kerja UPTD Kerajinan Industri yang difasilitasi sebanyak 1 organisasi Dekranasda, tercapai sebanyak 1 organisasi. Maka alokasi dana sebesar Rp.248.680.000,- terealisasi sebanyak Rp. 238.352.054,-, dengan tingkat realisasi keuangan 95,85% dan tingkat realisasi fisik 100%.
- 54) Penumbuhan Sentra Potensial. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah IKM yang mengikuti pameran hasil sentra target sebanyak 5 IKM, jumlah pameran yang diikuti target sebanyak 1 pameran, dan lamanya pelaksanaan pameran. Realisasi capaian target fisik sebanyak 5 IKM yang mengikuti pameran, 1 pameran yang diikuti selama 5 hari. Maka alokasi dana Rp.85.265.000,- dengan realisasi sebesar Rp.85.159.239,- dan tingkat realisasi keuangan mencapai angka 99,9% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 55) Perkuatan Asosiasi Makanan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah asosiasi pangan yang dibina sebanyak 1 asosiasi dan jumlah pameran pangan yang diikuti dengan target 1 pameran. Realisasi fisik yaitu 1 asosiasi pangan yang dibina dan 1 pameran pangan yang diikuti. Maka alokasi dana sebesar Rp.50.780.000,- terealisasi Rp.47.183.512,-, dengan tingkat realisasi keuangan 92,9% dan tingkat realisasi fisik 100%.

**BAB IV
P E N U T U P**

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019 merupakan cerminan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan LKIP mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sebagai pengelola urusan penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam urusan penanaman modal bidang perizinan pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan perindustrian dan pelayanan serta penempatan tenaga kerja di Kota Bukittinggi.

Dengan memperhatikan capaian kinerja di Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mencapai 97,37% dengan predikat “Sangat Tinggi” dan untuk semua kegiatan sudah terealisasi sesuai kebutuhan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

4.2 SARAN

Dengan adanya Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Sehingga dapat menjadi tolok ukur untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan berbagai kebijakan untuk yang akan datang. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019**

1. Perbaikan perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktivitas pegawai DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi;
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
5. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset.

Bukittinggi, Januari 2020
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI**



ISRA YONZA, SH, MH

NIP. 19710719 200212 1 003